

KONFLIK TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK

**Studi Kasus : Konflik Tanah di Desa Wedoro Anom
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**

SKRIPSI



KK

Fis P. 110/97

Kur
k

Disusun Oleh :

EKO KURNIAWAN

NIM. 079213501

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester Genap Tahun 1996/1997**

KONFLIK TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK

**Studi Kasus : Konflik Tanah di Desa Wedoro Anom
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**

SKRIPSI

**Maksud : Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Disusun Oleh :

EKO KURNIAWAN

NIM. 079213501

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester Genap Tahun 1996/1997**

“Dalam HIDUP ini kita selalu dihadapkan pada ujian **KEBERANIAN**. Keberanian **SEJATI** bukanlah berani mati, tetapi berani untuk hidup dengan segala **KONSEKWENSI**, dinamika dan romantikanya “

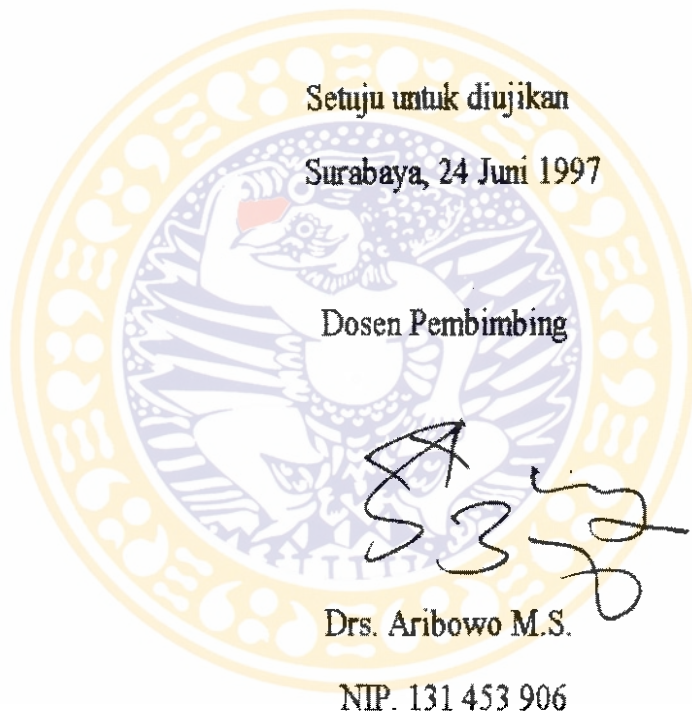
“**CINTA** merupakan sebuah perjalanan panjang yang tak **KUNJUNG** berakhir. Terkadang penuh liku, kerikil dan persimpangan. Namun **SETIA** merupakan penunjuk jalan ke **ARAH** cinta yang abadi menuju hidup yang lebih baik ”



Kupersembahkan Untuk :

Ibunda Suhartuti dan Istriku Tercinta

Dyah Ratna Kartikasari S.Si



Skripsi telah dipertahankan di hadapan
panitia penguji pada tanggal 10 Juli 1997

Panitia penguji terdiri dari:



Drs. Hariadi M. S.
NIP. 131 653 466

Drs. Krisnugroho M. S.
NIP. 131 180 1408

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Drs. Aribowo M. S.

Drs. Aribowo M. S.
NIP. 131 453 906

Bab V

Kesimpulan

1. Peranan dan keterlibatan negara (aparatus keamanan/militer) dalam proses pembebasan tanah di desa Wedoro Anom ternyata memang amat besar, yang ditunjukkan dengan keperkasaannya untuk mendapatkan tanah dengan segala macam usaha dan rekayasa bersama dengan pemerintah dan badan legislatif yang menyebabkan proses pembebasan berjalan di luar prosedur yang seharusnya berlaku.
2. Terjadinya proses otoriterisme pada upaya pembebasan tanah Wedoro Anom adalah disebabkan oleh beberapa faktor berikut, pertama yaitu peranan negara (pemerintah dan ABRI) yang terlalu banyak, tapi tanpa melibatkan DPRD secara substantif, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pengawasan, politik kepartaian yang sentrifugal dan tidak efektif, serta birokrasi yang terpusat merupakan faktor obyektif karena menyangkut kelemahan sistem dan terjadi dimana saja di Indonesia. Sementara pertukaran sumber daya antara penguasa dan pengusaha merupakan salah satu pola yang termasuk faktor subyektif. Pada studi kasus pembebasan tanah di desa Wedoro Anom yang terjadi juga dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Faktor kedua, upaya Kodam untuk menciptakan integritas nasional menyebabkan perlu

diciptakannya strategi yang mantap guna tercapainya stabilitas politik hal ini berkaitan dengan adanya tentangan yang bertubi-tubi dari penduduk desa Wedoro Anom.

3. Kasus pembebasan tanah di desa Wedoro Anom ini ternyata tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan menggunakan teori Otoriterisme Birokratik dari O'Donnell. Namun pada beberapa hal keadaan yang ada masih menerapkan ciri-ciri yang sesuai dengan yang terdapat pada model negara otoriter birokratik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada kasus ini teori Otoriterisme Birokratik masih terlalu luas apabila digunakan untuk dapat menjelaskan kasus konflik tanah ini, sehingga lebih tepat dikatakan apabila pada kasus ini yang terjadi adalah proses otoriterisme militer dalam proses pembebasan tanah.